

**PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2017- 2022

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

L A R A N T U K A

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabuapten Flores Timur.....	6
2.2 Sumber Daya SKPD.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.....	17
2.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi NTT.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).....	29
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Kedudukan Renstra SKPD.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.....	16

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jabatan Struktural	15
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Mengikuti Pendidikan /Pelatihan	15
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	17
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	19
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	20
Tabel 2.7 Faktor Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	21
Tabel 3.1 Jumlah PMKS yang telah ditangani dan diberdayakan	23
Tabel 3.2 Jumlah PSKS yang telah ditangani dan diberdayakan	24
Tabel 3.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah ditangani dan diberdayakan	24
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	33
Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	39
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk-Nya, maka salah satu kewajiban yang dipersyaratkan bagi setiap Instansi Pemerintah berupa Perencanaan Strategis (Renstra) dapat kami selesaikan sesuai rencana.

Renstra OPD ini berisi permasalahan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan yang akan ditempuh serta rencana prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hierarkinya, Rencana Startegis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Perencanaan Strategis ini selanjutnya akan menjadi dokumen Perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Disamping itu pula Renstra ini akan menjadi tolok ukur didalam menilai dan mengukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Flores Timur tercinta.

Larantuka, 22 Februari 2018

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



DRS. THEODORUS K. MARAN, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 199103 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Trend administrasi publik di era penerapan prinsip **Good Governance** saat ini menuntut sektor publik terutama birokrasi publik harus mengalami pergeseran nilai dari otorinisme Birokratis ke otonomi birokrasi atau perubahan dari Negara Pajabat menjadi Negara Pelayan yang secara implementatif menyentuh berbagai aspek pelayanan sektor publik pemerintahan termasuk sektor pelayanan dibidang kesejahteraan Sosial.

Agar konsep pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ini terarah dan terkendali dalam pembangunan yang efektif maka harus dimulai dengan satu perencanaan yang berkualitas yakni melalui sebuah Rencana yang Strategis (Renstra) pada semua penyelenggara kegiatan pembangunan sebagaimana antara lain Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelolah kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. karena itu renstra juga disebut manajemen strategis yaitu strategi atau desain yang memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup kelembagaan, sumberdaya manusia, anggaran dan system proses serta waktu yang diperlukan. Renstra diperlukan untuk menjawab tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama lima atau sepuluh tahun yang akan datang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

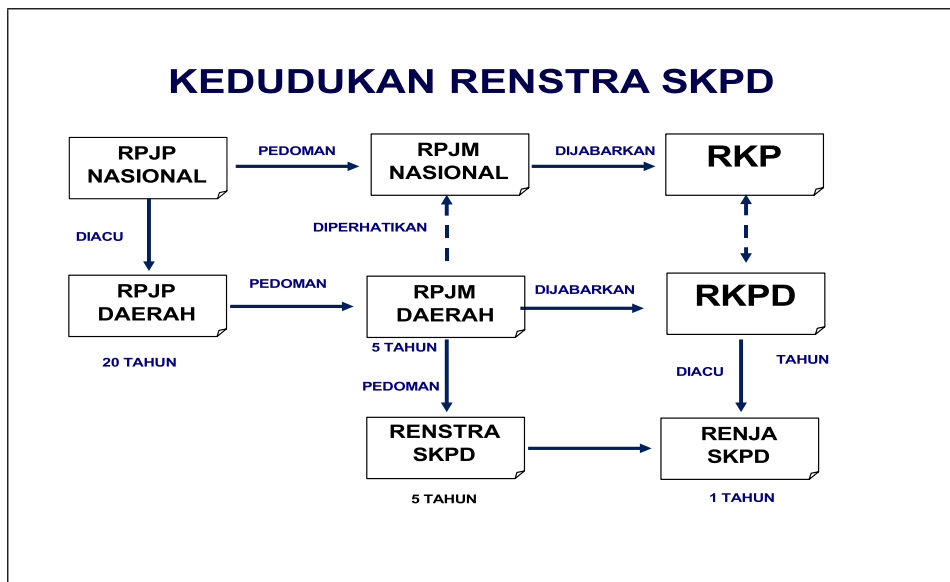
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk periode 2017 sampai dengan 2022, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang realistis.

Fungsi Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Renstra Dinas Sosial juga dipedomani oleh Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dimana untuk beberapa program yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten, maka akan di usulkan penganggarnya melalui APBN.

Gambar 1.1
Kedudukan Renstra SKPD



Dokumen ini penting karena dalam masa 5 (lima) tahun Dinas Sosial berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Dapat digunakan sebagai berikut :

1. Acuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
2. Dasar penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan SPM.
4. Permendagri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan penerapan SPM.
5. Permendagri No 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial RI No : 129/HUK/2008 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten / Kota
13. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
14. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur secara umum adalah sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Dinas Sosial dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tataran regional, nasional, maupun global.

Secara khusus maksud penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Memberikan arah dan menjadi acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu komponen pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial secara sinergis, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Mempermudah pengendalian, koordinasi dan evaluasi kegiatan.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten, secara khusus pembangunan di bidang sosial dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah agar terjadi sinergitas tupoksi Dinas Sosial selaku pelaksana pembangunan dalam bidang sosial dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota, dan dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumus pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta dengan mengacu dari Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial kabupaten Flores Timur, maka Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

➤ Struktur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

- Kepala Dinas :
 - Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - Bidang Rehabilitasi Sosial:
 1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - Bidang Pemberdayaan Sosial:
 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - Bidang Penanganan Fakir Miskin:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penatausahaan administrasi perkantoran;
- b. pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan dinas.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. penatausahaan keuangan;
- d. verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan program dan anggaran;
- c. evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- d. pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

– **Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia**

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi anak

dan lanjut usia. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi anak dan lanjut usia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang**

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- c pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial;
- b perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan perlindungan sosial korban bencana alam. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

- a penyusunan rencana kerja perlindungan sosial korban bencana alam;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam ;
- c pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam ;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan perlindungan sosial korban bencana sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan rencana kerja perlindungan sosial korban bencana sosial;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Jaminan Sosial Keluarga**

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan jaminan sosial keluarga.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan rencana kerja jaminan sosial keluarga;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga;
- c pelaksanaan program dan kegiatan jaminan sosial keluarga;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan jaminan sosial keluarga; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial;
- b perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- c pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga**

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perorangan dan keluarga.

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- c pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perorangan dan keluarga; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- c pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial**

Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan rencana kerja pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin;
- b perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
- c pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas**

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan identifikasi dan penguatan kapasitas.

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja identifikasi dan penguatan kapasitas;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi dan penguatan kapasitas;
- c pelaksanaan program dan kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan identifikasi dan penguatan kapasitas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan**

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan pendampingan dan pemberdayaan.

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja pendampingan dan pemberdayaan;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan dan pemberdayaan;
- c pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendampingan dan pemberdayaan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

– **Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan**

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a penyusunan rencana kerja bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- c pelaksanaan program dan kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- d pengendalian, evaluasi dan pelaporan bantuan stimulan dan penataan lingkungan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai perangkat Pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang baik, sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas Sosial saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak : 25 orang.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas sosial Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel. 2.1

*Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jabatan Struktural*

NO.	SKPD	ESELON			FUNGSIONAL	PELAKSANAAN				JMLH
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	DINAS SOSIAL	1	5	13	6	-	2	3	1	25

Tabel. 2.2

*Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Pendidikan*

NO.	SKPD	PENDIDIKAN									JMLH
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1.	DINAS SOSIAL	-	3	9	3	-	-	10	-	1	25

Tabel. 2.3

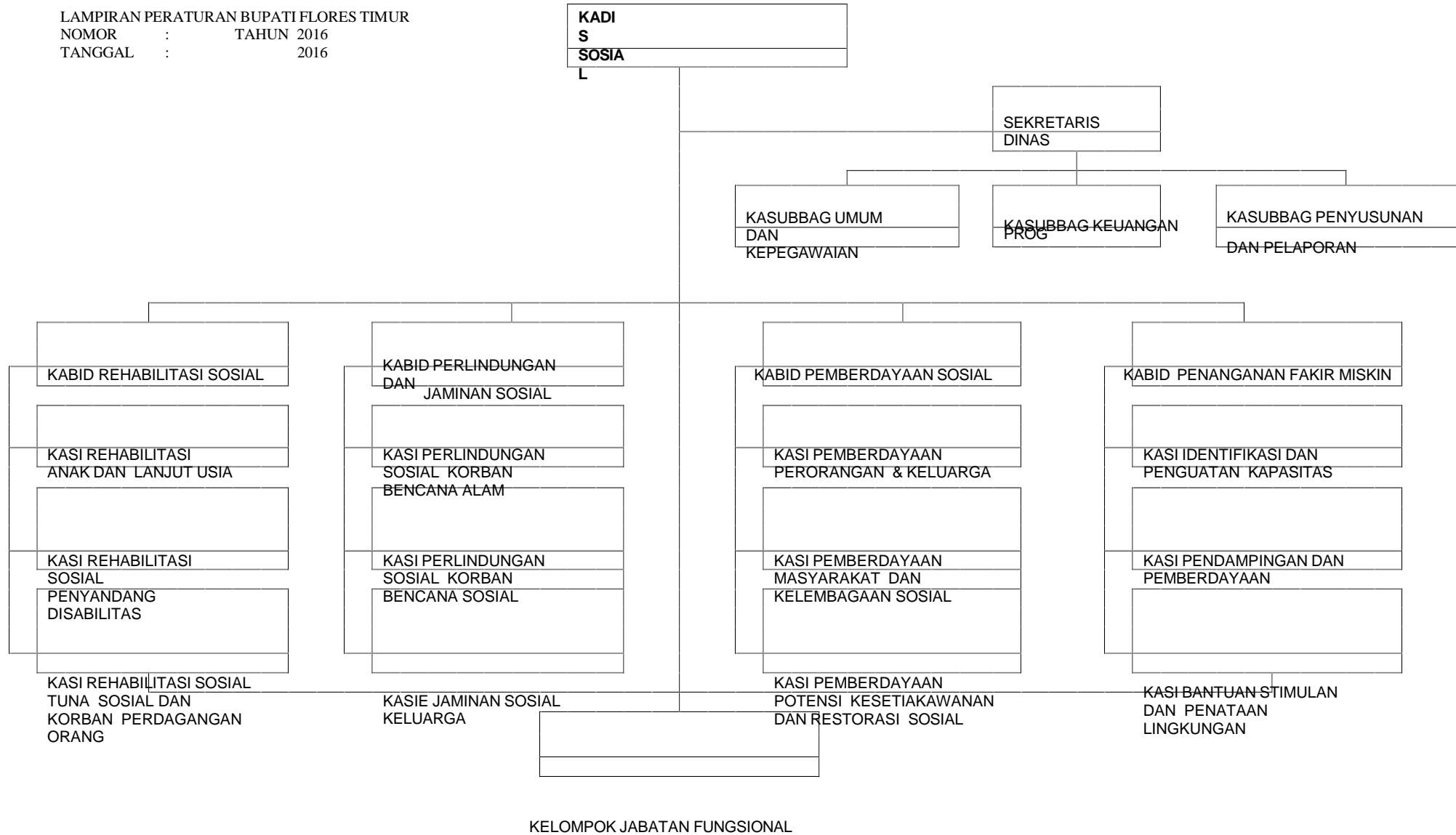
*Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
Mengikuti Pendidikan/Pelatihan*

NO.	SKPD	PIM			JMLH
		IV/SEPADA	III	II	
1.	DINAS SOSIAL	7	4	1	12

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016



2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Salah satu dukungan keberhasilan melaksanakan Visi, Misi, Program dan kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi di daerah. Sementara perkembangan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan alokasi sarana prasarana yang diharapkan untuk dapat mengimbangi kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan tantangan pelayanan PMKS dan PSKS.

Dengan gambaran kondisi sarana dan prasana tersebut yang sangat terbatas maka diperlukan adanya perbaikan, penataan, pengadaan dan pengembangan sarana, prasarana dan mobilitas secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia dan antisipasi menghadapi era informasi dan teknologi dimana tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kultur jaringan dan mempercepat informasi bagi pelayanan PMKS dan PSKS. Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana
DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2017

NO.	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1.	GEDUNG KANTOR	1	UNIT	
2.	SEPEDA MOTOR	3	UNIT	
3.	MOBIL MTU	2	UNIT	
4.	MOBIL RESQUE	1	UNIT	
5.	MOBIL DINAS OPERASIONAL	1	UNIT	
6.	MOBIL DUMLAP	1	UNIT	
7.	SPEED BOOD	3	UNIT	
8.	LAPTOP	17	UNIT	
9.	PRINTER	16	UNIT	
10.	UPS	10	UNIT	
11.	AC	3	UNIT	
12.	DISPENSER	2	BUAH	
13.	KIPAS ANGIN	4	BUAH	
14.	LEMARI	11	BUAH	
15.	MEJA	40	BUAH	
16.	KURSI	49	BUAH	
17.	KURSI SOFA	5	BUAH	
	TOTAL	169	BUAH	

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dilakukan berdasarkan sasaran/target Renstra tersebut pada periode sebelumnya dan menurut Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial.

Interpretasi tentang pelayanan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan dan target mana saja yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial tidak terlepas dari penanganan PMKS yang merupakan fokus sasaran dari pelayanan kesejahteraan sosial. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok penduduk yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan pemerlu pelayanan/PMKS, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial.

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Renstra sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%			12,15	13,25	15,35	19,90	21,35	10,13	12,35	15,25	17,12	25,15	83,37	93,21	99,35	86,03	117,80
2.	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%			15,35	16,12	12,27	13,45	22,81	13,11	14,85	15,14	17,25	19,65	85,41	92,12	123,39	128,25	86,15
3.	Persentase (%) panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%			10,13	12,35	15,25	17,12	25,15	12,25	13,25	15,35	17,90	21,35	120,93	107,29	100,66	104,56	84,89
4.	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%			10,17	11,22	12,25	12,60	13,76	12,17	11,23	16,12	14,36	18,29	119,67	100,09	131,59	113,97	132,92
5.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80%			12,15	13,25	15,35	17,90	21,35	15,35	16,12	12,27	13,45	22,81	126,34	121,66	73,93	75,14	106,84
6.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	80%			13,11	14,85	15,14	17,25	19,65	13,15	11,33	14,35	24,05	17,12	100,31	76,30	94,78	139,42	87,12
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%			8,12	8,18	8,08	8,15	7,47	8,11	8,15	7,17	8,21	8,36	99,88	99,63	88,74	100,74	111,91

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(PAD)																	
-Belanja Tidak Langsung	1.850.043.160	1.807.952.959	1.867.624.433,92	2.136.517.487,51	2.260.916.222,17	1.849.769.650	1.801.592.660	1.863.125.775	2.106.408.815	2.260.089.973	273.510	6.360.295	4.498.658,92	30.108.672,51	826.249,17	1.984.610.852,52	1.976.197.374,60
-Belanja Langsung :	4.223.239.300	12.119.420.250	10.680.587.700	10.541.231.350	9.633.140.450	4.081.857.406	11.007.779.271	8.622.630.560	10.039.225.583	9.255.207.220	141.381.894	1.111.640.975	2.057.957.134	502.005.767	377.933.230	9.439.523.811,20	8.601.340.009,20
*Belanja Pegawai	106.435.000	269.426.000	301.812.500	544.248.000	499.400.000	99.569.000	260.255.000	268.460.000	500.989.500	491.981.000	6.866.000	9.171.000	33.352.500	43.258.500	7.419.000	344.264.300	324.250.900
*Belanja Barang dan Jasa	3.581.759.300	11.510.243.050	10.267.557.200	9.908.922.550	9.133.740.450	3.547.943.406	10.408.927.271	8.242.952.560	9.446.236.083	8.761.926.220	33.815.894	1.101.315.775	2.024.604.634	462.686.467	371.814.230	8.880.444.511,20	8.081.597.109,20
*Belanja Modal	362.745.000	339.751.200	111.218.000	92.000.000	0	53.670.000	338.597.000	111.218.000	92.000.000	0	309.075.000	1.154.200	0	0	0	181.142.840	119.097.000

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran penanganan dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Dibawah ini dapat kita gambarkan secara rinci Peluang dan tantangan penanganan Pelayanan PMKS dan PSKS di kabupaten Flores Timur.

2.4.1 Lingkungan internal

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dilakukanlah analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya kongkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kondisi yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor Lingkungan Internal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Faktor Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

NO.	FAKTOR INTERNAL	
	KEKUATAN	KELEMAHAN
1.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi	Belum validnya database PMKS;
2.	Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya kerja sama lintas bidang;
3.	Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf	Belum integrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial
4.	Adanya Renstra SKPD;	
5.	Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;	
6.	Kelembagaan organisasi yang optimal;	
7.	Adanya beberapa perda tentang penanganan PMKS;	
8.	Lingkungan kerja yang kondusif;	

2.4.2 Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya komitmen global, regional dan nasional tentang pembangunan kesejahteraan sosial, dituangkan dalam berbagai kesepakatan kerja.
- b. Adanya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan bidang sosial.
- c. Dukungan finansial pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pengentasan kemiskinan.

2. Tantangan

- a. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 3 pulau yaitu pulau Solor, Pulau Adonara dan Daratan Flores Timur berpotensi terhadap masuk keluarnya imigran gelap dan TKI ilegal yang dapat memicu timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial.
- b. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya kepastian dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah diusulkan.
- c. Masih kuatnya adat istiadat dan budaya lamaholot yang turut berpengaruh terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial.
- d. Rendahnya sumber daya manusia akibat putus sekolah serta tidak diimbangi dengan adanya keterampilan kerja yang turut berpengaruh terhadap lambatnya proses pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Flores Timur yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (kesehatan, pengetahuan dan hidup layak), Sampai dengan tahun 2016, IPM Flores Timur mencapai 64,36. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 66,04. Indeks ini menunjukkan permasalahan sosial di tingkat mikro di Kabupaten Flores Timur jika dibanding dengan kabupaten lain masih cukup banyak terutama masalah Kesejahteraan Sosial.

Persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah bagaimana upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan /Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial di Kabupaten Flores Timur kondisinya mengalami kemajuan terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain pelayanan jumlah PMKS dan masyarakat miskin yang telah di tangani dan diberdayakan, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Adapun data Jumlah PMKS, PSKS dan RTM yang telah ditangani dan diberdayakan Tahun 2016-2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
*Jumlah PMKS
yang telah ditangani dan diberdayakan*

No.	JUMLAH PMKS	26	PMKS
1.	PMKS yang tertangani Dinsos Kab. Flotim	34,182	orang
2.	PMKS yang diberdayakan Thn 2016	439	orang
3.	PMKS yang belum diberdayakan Thn 2016	26,088	orang
4.	PMKS yang diberdayakan Thn 2017	288	orang
5.	PMKS yang belum diberdayakan Thn 2017	25,945	orang

Tabel 3.2

*Jumlah PSKS
yang telah ditangani dan diberdayakan*

No.	PSKS	14	PSKS
1.	PSKS yang tertangani DINSOS Kab. FLOTIM	20,425	orang
2.	PSKS yang diberdayakan Thn 2016	423	orang
3.	PSKS yang belum diberdayakan Thn 2016	14,497	orang
4.	PSKS yang diberdayakan Thn 2017	581	orang
5.	PSKS yang belum diberdayakan Thn 2017	19,841	orang

Tabel 3.3

*Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang telah ditangani dan diberdayakan*

RTM Yang tertangani DINSOS Kab. FLOTIM		24,233	Rumah
1.	RTM yang diberdayakan Thn 2016	205	KK
2.	RTM yang belum diberdayakan Thn 2016	24,028	KK
3.	RTM yang diberdayakan Thn 2017	83	KK
4.	RTM yang belum diberdayakan Thn 2017	23,945	KK

Sumber Data : Sub Bagian PDE Dinas Sosial Kab. Flotim

Selain itu berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur telah meningkat. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 dari 26 PMKS dengan 34,182 jiwa, maka PMKS yang angkanya masih tinggi adalah balita terlantar (1349 jiwa), anak terlantar (3248 jiwa), anak dengan kedisabilitas (536jiwa), penyandang disabilitas (1928 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5200 jiwa), lansia terlantar (3602 jiwa), fakir miskin (15690), Dari data tersebut sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas,
- b. pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan yang disediakan dan penyediaan anggaran yang masih terbatas,
- c. Tidak tersedianya database akurat dan pemetaan yang jelas dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah Kesejahteraan sosial.
- d. peran masyarakat melalui organisasi/Lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,

- e. Terbatasnya SDM dan sarana prasarana Panti-panti sosial sehingga peran Panti yang diharapkan dapat menjadi salah satu tempat pelayanan sosial tidak optimal.
- f. kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas, dan
- g. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana posisi peran OPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai pelaksanaan periode ke tiga RPJPD Tahun 2005-2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2017–2022 adalah visi besar Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur periode 2017 – 2022 sebagai berikut :

“ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sector-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. *Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. *Misi Kedua Selamatkan Infrastuktur Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrstruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. *Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur* dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. *Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur* dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. *Misi Kelima Reformasi Birokrasi* dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government.

Dari Penjabaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka Tugas dan Fungsi Dinas Soaial adalah bagaimana menjabarkan *Misi ke Satu* dari Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu Selamatkan Orang Muda Flores Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial seperti yang telah diuraikan pada Bab I yang secara umum mempunyai Tujuan Pelayanan OPD adalah *Penyelenggaraan Pelayanan dalam Kesejahteraan Sosial*.

Dalam memberikan pelayanan kita juga akan diperhadapkan pada beberapa Factor penghambat dan juga sekaligus pendorong terhadap pencapaian Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telahaan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telahaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi NTT dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur periode 2017-2022 bertujuan untuk mengetahui Visi, Misi, arah kebijakan umum dan program-program strategis dalam bidang Sosial baik di tingkat kementerian maupun

Pemerintah Provinsi NTT sehingga dapat menjadi referensi dalam menjaga keterkaitan dan kesinambungan program / kegiatan.

Visi, Misi Renstra Kementerian Sosial RI yang tertuang dalam Perencanaan Strategis 2015-2019, antara lain :

VISI : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

MISI :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan

Visi, Misi dan Program Strategis Dinas Sosial Provinsi NTT yang tertuang dalam Perencanaan Strategis 2009-2013 antara lain :

Visi :

“TERWUJUD PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT MELALUI PEKERJAAN SOSIAL PROFESIONAL”

Misi :

1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat;
2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakwanan sosial;
3. Meningkatkan investasi modal sosial;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan sosial bagi aparatur dan masyarakat;
5. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan kualitas sistem dan informasi kesejahteraan sosial;

Penjelasan masing-masing Misi :

- Misi Kesatu** : Sebagai upaya yang sistematis dan terencana dalam membangun, memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat khususnya PMKS sehingga memiliki daya tahan sosial yang tinggi dan mampu mengatasi berbagai resiko atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta pengaruh globalisasi lainnya.
- Misi Kedua** : Sebagaimana motto klasik yang mengatakan bahwa ” *Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa – jasa pahlawannya*”. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka perlu adanya upaya untuk terus melestarikan jiwa dan semangat, serta nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial bagi segenap masyarakat khususnya dikalangan generasi muda sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari.
- Misi Ketiga** : Memperhatikan situasi dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang cenderung meningkat serta terbatasnya sumber pendanaan, maka diperlukan alternatif untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial, melalui peningkatan investasi modal sosial dalam bentuk peningkatan peran aktif dan kemitraan komponen modal sosial yakni, lembaga-lembaga sosial masyarakat (Orsos/LSM/ dan organisasi profesi, Panti Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat, PSM) sektor dunia usaha, dan sektor terkait lainnya.
- Misi Keempat** : Era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut kesiapan SDM dalam ilmu, teknologi, sikap dan mental serta cara pikir. Untuk itu dalam upaya penyediaan pelayanan sosial yang tepat guna dan berhasil guna diperlukan pengembangan SDM kesejahteraan sosial yang mampu menghadapi tantangan tersebut. Peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial harus didukung dengan tersedianya SDM kesejahteraan sosial yang berkualitas, berkarakter, dan profesional baik aparat pemerintah maupun masyarakat (TKSM).
- Misi Kelima** : Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi sosial dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara adil dan merata, harus di dukung dengan proses perencanaan yang realistis dan komprehensif. Disamping itu perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program secara berkelanjutan

sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya daya guna dan hasil guna program pembangunan kesejahteraan sosial.

Misi Keenam : Pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab memerlukan dukungan data dan informasi yang berkualitas, lengkap, akurat, dan berkesinambungan. Disisi lain kendala yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi adalah masih terbatasnya data dan informasi kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang lengkap dan berkualitas. Untuk itu agar data dan informasi kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diperlukan suatu sistem informasi kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan mulai dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat pusat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan lain yang bersifat non spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Flores Timur tentunya baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada dibawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2017 – 2022. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi berdampak terhadap aspek kehidupan sosial.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Flores Timur dengan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial akan diarahkan untuk mengatasi atau mengurangi jumlah dan resiko Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan cara Bantuan dan Pemberdayaan bagi PMKS yang bersifat perorangan maupun kelompok dan tetap mengacu pada SSWP dari masing –masing wilayah.

Adapun Bantuan dan Pemberdayaan bagi PMKS berdasarkan SSWP adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Bantuan Pemberdayaan Pengembangan Usaha Pertanian sebagai berikut :

- SSWP I : Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Demon Pagong, Tanjung Bunga Adonara Barat.
- SSWP II : Kec. Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena

- SSWP III : Kec. Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado
 - SSWP IV : Kec. Witihama, Kelubagolit dan Adonara
 - SSWP V : Kec. Solor Timur, Solor Barat dan Solor Selatan
2. Sasaran Bantuan Pemberdayaan Pengembangan Usaha Peternakan sebagai berikut :
- SSWP I : Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Demon Pagong, Tanjung Bunga Adonara Barat
 - SSWP II : Kec. Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena
 - SSWP III : Kec. Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado
 - SSWP IV : Kec. Witihama, Kelubagolit dan Adonara
 - SSWP V : Kec. Solor Timur, Solor Barat dan Solor Selatan
3. Sasaran Bantuan Pemberdayaan Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :
- SSWP I : Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Demon Pagong, Tanjung Bunga Adonara Barat.
 - SSWP II : Kec. Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena
 - SSWP III : Kec. Adonara Timur, Ile Boleng, dan Wotan Ulumado
 - SSWP IV : Kec. Witihama, dan Adonara
 - SSWP V : Kec. Solor Timur, Solor Barat dan Solor Selatan
4. Sasaran Bantuan Pemberdayaan Pengembangan Kegiatan Usaha Industri sebagai berikut :
- SSWP I : Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Demon Pagong, Tanjung Bunga Adonara Barat.
 - SSWP II : Kec. Wulanggitang, Ile Bura, dan Titehena
 - SSWP III : Kec. Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado
 - SSWP IV : Kec. Witihama, Kelubagolit dan Adonara
 - SSWP V : Kec. Solor Timur, Solor Barat dan Solor Selatan

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial semakin banyak, kompleks dan beraneka ragam bentuknya, sehingga perlu penanganan komprehensif serta berkelanjutan. Berikut ini isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur :

1. Ketersediaan database PMKS yang valid;
2. Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) rendah;
4. Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing;

5. Sinergitas dan sinkornisasi program / anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
6. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial (Panti) yang representatif (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS
7. Masih rendahnya penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan terutama jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat.
8. Belum tersedianya data yang valid tentang warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial
9. Lokasi dan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur
10. Ancaman bencana alam dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Flores Timur
11. Konflik sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, suku, politik dan sosial merupakan ancaman yang perlu di waspadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

4.1.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1 Terwujudnya kemandirian peran karang taruna dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.
- 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 3 Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- 4 Meningkatnya pelayanan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial berbasis komunitas dalam panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar.
4. Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS .
5. Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya
6. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
7. Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;
8. Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
9. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial
10. Membina dan mengembangkan peran bagi Karang taruna guna terciptanya kemandirian pada generasi muda
11. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya kemandirian peran karang taruna dibidang pembangunan kesejahteraan sosial	Membina dan mengembangkan peran bagi Karang taruna guna terciptanya kemandirian pada generasi muda	Jumlah Karang Taruna yang diberikan bimbingan teknis dan ketrampilan dalam bidang manajemen organisasi, ketrampilan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), kepemimpinan dan kaderisasi serta ketrampilan teknis	24 lembaga	44 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	76 lembaga
			Jumlah Karang Taruna yang diberikan fasilitas dan bantuan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan Karang Taruna	24 lembaga	44 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	76 lembaga
2.	Meningkatkannya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	70 orang	90 orang	105 orang	120 orang
3.	Meningkatkannya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;	Jumah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	-	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
			Jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui Kube	143 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
			Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan	2 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			Jumlah rasio KMM yang diberdayakan	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang	300 orang
			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi PKH	3.990 org	7.952 org	10.452 org	12.592 org	15.452 org
		Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Jumlah pemberdayaan warga KAT	44 org	44 org	85 org	85 org	85 org

	miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar	Jumlah Rumah adat yg dibangun	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat
		Jumlah Kekeragaman Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan		6 kasus	6 kasus	6 kasus	6 kasus
		Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan	120 org	150 org	175 org	180 org	180 org
	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	Jumlah rasio Warsosek yang diberdayakan	45 org	75 org	85 org	85 org	85 org
		Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial
		Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan	35 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial	40 eks penyandang sosial
		Jumlah Kelompok Minoritas yang mengikuti Pendidikan dan Ketrampilan		20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas
		Jumlah Anak yang mendapatkan Sosialisasi NAPZA	200 siswa/i	200 siswa/i	200 siswa/i	200 siswa/i	200 siswa/i
	Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	25 klien	25 klien	25 klien	25 klien	25 klien
		Jumlah anak yang menjadi bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak		20 org	20 org	20 org	20 org
		Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan		30 anak terlantar	30 anak terlantar	30 anak terlantar	30 anak terlantar
		Jumlah Penyandang Disabilitas yg mendapat pengobatan dan perlindungan sosial		50 penyandang disabilitas	50 penyandang disabilitas	50 penyandang disabilitas	50 penyandang disabilitas
		Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial	120 lansia	150 lansia	150 lansia	150 lansia	150 lansia

			Jumlah Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah yang direhabilitasi	-	30 org migran	30 org migran	30 org migran	30 org migran
		Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana	Jumlah KK yang diberikan bantuan	2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org
		Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat	Jumlah /rumah Perawatan Penyandang cacat dan trauma yang dibangun	-	1 unit	-	-	-
			Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang difasilitasi dana pemberdayaan	62 penyandang disabilitas	100 penyandang disabilitas	100 penyandang disabilitas	100 penyandang disabilitas	100 penyandang disabilitas
4.	Meningkatnya pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial berbasis komunitas dalam panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera	Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial	Jumlah sarana prasarana panti yang dibangun/direhabilitasi					
			Jumlah penghuni panti yang diberikan pelatihan dan ketrampilan	322 org	322 org	322 org	322 org	322 org

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan kebijakan

Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Selama lima tahun ke depan sesuai dengan misi dan arahan RPJMD 2017-2022 tersebut di atas, perlu dibuat suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang maka strategi yang dilaksanakan Dinas Sosial kabupaten Flores Timur pada rentang waktu capaian selama lima tahun :

1. Meningkatkan Peran Aktif Karang Taruna dalam Upaya pencegahan timbulnya permasalahan sosial di kalangan generasi muda
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Yang Mendukung Pemberdayaan Sosial, Kemitraan Sosial dan Partisipasi sosial.
3. Perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
5. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha.
6. Revitalisasi Penataan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial.

Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik. Dibawah ini kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mengemban visi misi yang ada.

1. Strategi Meningkatkan Peran Aktif Karang Taruna dalam Upaya pencegahan timbulnya permasalahan sosial di kalangan generasi muda, kebijakan yang ditempuh :
 - a. Memantapkan pemahaman tentang Karang Taruna sebagai organisasi sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di kalangan masyarakat terutama pembina, pengurus dan aktivis Karang Taruna;
 - b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus maupun aktivis Karang Taruna dalam bidang manajemen organisasi, ketrampilan Usaha Kesejahteraan

- Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), kepemimpinan dan kaderisasi serta ketrampilan teknis
- c. Pengembangan fasilitas dan bantuan stimulan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna
2. Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Yang Mendukung Pemberdayaan Sosial, Kemitraan Sosial dan Partisipasi sosial., kebijakan yang ditempuh :
- a. Pengembangan kualitas sumber daya aparatur melalui sejumlah kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis, fungsional maupun umum.
 - b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
 - c. Penegakan disiplin kepegawaian secara profesional dengan pemberian kompensasi berupa reward dan punishment yang jelas.
 - d. Menciptakan suasana organisasi yang memungkinkan aparatur memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja.
3. Strategi Perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, kebijakan yang ditempuh :
- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
 - b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
 - c. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
 - d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
 - e. Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial ;
4. Strategi Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar kebijakan yang ditempuh :
- a. Meningkatkan peran dan fungsi TKSK dalam pelaksanaan validasi data base PMKS sehingga dapat diperoleh data base yang akurat terhadap PMKS yang akan dilayani berdasarkan prinsip keadilan dan manfaat
 - b. Meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan santunan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya

5. Strategi Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha, kebijakan yang ditempuh :
 - a. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
 - d. Pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalah.
 - e. Meningkatkan Kapasitas SDM dan lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

6. Strategi Revitalisasi Penataan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial., kebijakan yang ditempuh :
 - a. Membuat Perencanaan yang baik tentang Pola Pelayanan di Panti
 - b. Meningkatkan Kapasitas SDM dan pendampingan para pengelola panti
 - c. Fasilitasi sarana dan Prasarana serta operasional pelayanan di Panti
 - d. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Panti

Berikut ini strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam lima tahun mendatang, dapat diuraikan didalam Tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		: FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN KOTA MENATA					
MISI I		: Selamatkan Orang Muda Flores Timur					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.1	Terwujudnya kemandirian peran karang taruna dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.	1.1.1	Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	1.1.1.1	Meningkatkan Peran Aktif Karang Taruna dalam Upaya pencegahan timbulnya permasalahan sosial dikalangan generasi muda	1.1.1.1.1	Memantapkan pemahaman tentang Karang Taruna sebagai organisasi sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di kalangan masyarakat terutama pembina, pengurus dan aktivis Karang Taruna;
						1.1.1.1.2	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus maupun aktivis Karang Taruna dalam bidang manajemen organisasi, ketrampilan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), kepemimpinan dan kaderisasi serta ketrampilan teknis;
						1.1.1.1.3	Dukungan fasilitas dan bantuan stimulan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna;
1.2	Meningkatkannya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial.	1.2.1	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara	1.2.1.1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Yang Mendukung Pemberdayaan Sosial, Kemitraan Sosial dan Partisipasi sosial	1.2.1.1.1	Pengembangan kualitas sumber daya aparatur melalui sejumlah kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis, fungsional maupun umum.
						1.2.1.1.2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
						1.2.1.1.3	Penegakan disiplin kepegawaian secara profesional dengan pemberian kompensasi berupa reward dan punishment yang jelas.
						1.2.1.1.4	Menciptakan suasana organisasi yang memungkinkan aparatur memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja
1.3	Meningkatkannya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.3.1	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS	1.3.1.1	Perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.3.1.1.1	Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;

						1.3.1.1.2	Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat
						1.3.1.1.3	Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat
						1.3.1.1.4	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha
						1.3.1.1.5	Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial
				1.3.1.2	Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1.3.1.2.1	Meningkatkan peran dan fungsi TKSK dalam pelaksanaan validasi data base PMKS sehingga dapat diperoleh data base yang akurat terhadap PMKS yang akan dilayani berdasarkan prinsip keadilan dan manfaat
						1.3.1.2.2	Meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan santunan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya
		1.3.2	Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar				
		1.3.3	Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS				
		1.3.4	Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya				
		1.3.5	Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;				

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

1.4	Meningkatnya pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial berbasis komunitas dalam panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera	1.4.1	Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial	1.4.1.1	Revitalisasi Penataan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial	1.4.1.1.1	Membuat Perencanaan yang baik tentang Pola Pelayanan di Panti
						1.4.2.1.2	Meningkatkan Kapasitas SDM dan pendampingan para pengelola panti
						1.4.2.1.3	Fasilitasi sarana dan Prasarana serta operasional pelayanan di Panti
						1.4.2.1.4	Meningkatkan Pembinaan Manajemen Panti

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai kelanjutan dari ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan maka melalui kebijakan dan strategi yang telah dipilih diperlukan penjabaran tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pokok – pokok program dan indikator kinerja pencapaiannya untuk periode lima tahun kedepan. Program-program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022, lebih diarahkan pada :

1. Penyelenggaran Rehabilitasi Sosial
2. Penyelenggaraan Penanganan Fakir miskin
3. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial

Pokok – pokok program dan kegiatan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dapat dirinci lebih lanjut kedalam program – program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat / Monumen Bersejarah
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**
 - Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Peningkatan kesejahteraan sosial peran keluarga (KMM)
 - Pemberdayaan wanita Rawan Sosial Ekonomi (WARSOSEK)
 - Pemberdayaan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - Pemberdayaan keluarga bermasalah sosial psikologis (MSP)
 - Pendampingan pemberdayaan warga KAT
 - Bantuan stimulan Bedah Rumah Penduduk (Rumah Layak Huni)
 - Bantuan stimulan pembangunan rumah adat KAT
- 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 - Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
 - Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana.
 - Penanganan masalah- masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
 - Sosialisasi Pencegahan Penggunaan NAPZA
 - Pemberian Bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos
 - Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Rehabilitasi Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Luar Panti
 - Rehabilitasi Eks Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah
 - Bantuan Keserasian sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) daerah konflik perbatasan
- 7. Program Pembinaan Anak terlantar**
 - Praktek Kerja bagi Anak terlantar
 - Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
- 8. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma**
 - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
 - Pengobatan dan perlindungan para penyandang cacat dan eks trauma

9. Program Pembinaan Pani Asuhan /Jompo

- Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan /jompo
- Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni asuhan /jompo

10. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

- Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- Penanaman nilai-nilai keperintisan kejuangan kephlawanan dan kesetiakawanan sosial
- Kampanye restorasi sosial
- Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Koordinasi dan Pemutakhiran Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Perkotaan, pedesaan dan pesisir serta data KIP, KIS dan KKS
- Fasilitasi Taruna siaga Bencana (TAGANA)

Pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Sosial tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila mendapat dukungan optimal dari Pemerintah Daerah (APBD II) dan alokasi dana dari APBD I / APBN serta partisipasi aktif masyarakat dan Dunia Usaha. *”Hal yang lebih penting adalah adanya kemauan politik pemerintah daerah melalui kerangka kebijakan daerah dan kerangka kebijakan anggaran daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial PMKS, yang merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur”.*

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Sosial		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan			12 Bulan	787.600.000		972.970.000		1.091.200.000		1.77.200.000		4.141.213.582	Dinas Sosial Kab. Flores Timur	Dinas Sosial
		1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tercapainya pelayanan jasa surat menyurat perkantoran	400 lbr perangko 5.000 dan 500 lbr materai 6.000	400 lbr perangko 5000 dan 500 lbr materai 6000	5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	60 Bulan	45.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	4 kran air dan 4 meteran listrik dan jasa internet	4 kran air dan 4 meteran listrik dan jasa internet	98.343.582		45.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	60 Bulan	293.343.582		Dinas Sosial
		1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	3 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan operasional, 1 unit mobil truck, 1 unit mobil Dumlap dan 1 unit mobil Ranger	3 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan operasional, 1 unit mobil truck, 1 unit mobil Dumlap dan 1 unit mobil Ranger	8.900.000		132.000.000		134.800.000		137.500.000		140.000.000	60 Bulan	553.200.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 orang	6 orang		8 orang	50.000.000	8 orang	55.000.000	8 orang	60.500.000	8 orang	66.500.000	8 orang	232.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan perawatan kantor	18 jenis alat kebersihan			12 Bulan	2.000.000		3.000.000		3.600.000		4.200.000		12.800.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 jenis ATK			45 jenis	50.000.000	45 jenis	55.000.000		60.000.000	45 jenis	65.000.000	225 jenis	230.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				50.000 lbr	20.000.000	55.000 lbr	25.000.000	60.000 lbr	30.000.000	65.000 lbr	35.000.000	300.0001 br	110.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Listrik/Peneran	Terpenuhi kebutuhan penerangan	12 jenis peralatan listrik			12 Bulan	10.000.000		12.000.000		13.500.000		14.000.000	60 bulan	49.500.000		Dinas Sosial

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

			gan Bangunan Kantor															
	1.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 bh Laptop, 8 bh printer, AC 2 Unit, Dispencer 1 bh dan UPS 4 bh			5 unit	80.000.000	6 unit	100.000.000	7 unit	105.000.000	8 unit	116.000.000	35 unit	401.000.000		Dinas Sosial
	1.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	365 exemplar Pos Kupang			365 exemp	3.600.000	365 exemp	4.800.000	365 exemp	5.000.000	365 exemp	5.700.000	1.825 exemp	19.100.000		Dinas Sosial
	1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	500 makan dan 375 snack			510 makan dan 400 snack	30.000.000	525 makan dan 410 snack	35.870.000	530 makan dan 425 snack	47.500.000	545 makan dan 430 snack	49.000.000	2.660 makan dan 2.110 snack	162.370.000		Dinas Sosial
	1.06.01.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	115 org untuk Kabupaten, Jakarta 11 org, Kupang 11 org dan Malaysia 2 org			Kab. 125 org, Kupang 15 org, Jakarta 15 org dan Malaysia 2 org	350.000.000	Kab. 130 org, Kupang 20 org, Jakarta 20 org	485.000.000	Kab. 135 org, Kupang 25 org, Jakarta 25 org	560.000.000	Kab. 140 org, Kupang 30 org, Jakarta 30 org	607.000.000	Kab. 675 org, Kupang 125 org, Jakarta 125 org	2.002.000.000		Kab., Prov. dan Jakarta
	1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Terlaksana penyediaan jasa tenaga pendukung teknis perkantoran	26 org Tenaga Honor	19 org	253.222.600	19 org	253.222.600	19 org	262.200.000	20 org	398.400.000	20 org	420.000.000	20 org	1.587.045.200		Dinas Sosial
	1.06.01.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan				385.000.000		437.500.000		467.000.000		497.500.000		1.787.000.000		
	1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional															Dinas Sosial
	1.06.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor				1 paket	85.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	96.000.000	1 paket	100.000.000	4 paket	371.000.000		Dinas Sosial
	1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor				1 paket	80.000.000		89.000.000		95.000.000		100.000.000	5 paket	364.000.000		Dinas Sosial
	1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan			12 Bulan	145.000.000		158.000.000		165.000.000		176.000.000		644.000.000		Dinas Sosial
	1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit			2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil	30.000.000	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil	50.000.000	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil	55.000.000	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil	60.000.000	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil	195.000.000		Dinas Sosial

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

					speedbood dan 1 unit mobil Dumlap			Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit speedbood dan 1 unit mobil Dumlap		Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit speedbood dan 1 unit mobil Dumlap		Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit speedbood dan 1 unit mobil Dumlap		Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit speedbood dan 1 unit mobil Dumlap					
		1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	17 bh laptop, 9 bh printer, 3 unit AC dan UPS 5 bh			25 bh laptop, 10 compter, 15 bh printer, 4 unit AC dan UPS 10 bh	5.000.000	25 bh laptop, 10 compter, 15 bh printer, 4 unit AC dan	5.500.000	25 bh laptop, 10 compter, 15 bh printer, 4 unit AC dan	6.000.000	25 bh laptop, 10 compter, 15 bh printer, 4 unit AC	6.500.000	25 bh laptop, 10 computer, 15 bh printer, 4 unit AC dan	23.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat/Monumen Bersejarah	Terlaksananya pemeliharaan monumen bersejarah	1 bh sumur gali, 1 bh air mancur, pembangunan paving block monumen Herman Fernandez dan penambahan daya			5 lokasi	40.000.000	5 lokasi	45.000.000	5 lokasi	50.000.000	5 lokasi	55.000.000	5 lokasi	190.000.000		TMP Lapak Tana & Monumen Herman Fernandez
		1.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	47 Orang			70 org	100.000.000	90 org	150.000.000	105 org	200.000.000	120 org	250.000.000	520 org	700.000.000		Kab., Prov. dan Jakarta
		1.06.01.05.03	BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek peraturan perundang-undangan	40 org utk Kabupaten, Jakarta (3 org) dan Kupang 4 org			5 org utk Kabupten, Jakarta (2 org) dan Kupang 2 org	50.000.000	7 org utk Kabupten, Jakarta (2 org) dan Kupang 3 org	65.000.000	10 org utk Kabupten, Jakarta (3 org) dan Kupang 3 org	80.000.000	10 org utk Kabupten, Jakarta (3 org) dan Kupang 3 org	100.000.000	32 org utk Kabupten, Jakarta (10 org) dan Kupang 11 org	295.000.000		Kab., Prov. dan Jakarta
		1.06.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD	25 Buku	35 Buku	81.640.110	50 dokumen	90.000.000	55 dokumen	100.000.000	60 dokumen	105.000.000	65 dokumen	110.000.000	300 dokumen	405.000.000		Dinas Sosial
		1.06.01.06.01	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	25 Buku	35 Buku	81.640.110	50 dokumen	90.000.000	55 dokumen	100.000.000	60 dokumen	105.000.000	65 dokumen	110.000.000	300 dokumen	405.000.000		Dinas Sosial

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase Penanganan Fakir miskin.	20,18%	2,29%	1.860.663.540	2,93%	2.855.000000	3,50%	3.312.500.000	3,75%	3.591.250.000	3,77%	3.839.100.000	16,87%	15.458.513.540		19 Kecamatan
		1.06.01.15.03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	0	0	0	25 org	75.000.000	25 org	100.000.000	25 org	125.000.000	25 org	150.000.000	100 org	450.000.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.04	Peningkatan kesejahteraan sosial peran keluarga (KMM)	Jumlah rasio KMM yang diberdayakan	150 org	150 org	860.000.000	200 org	625.000.000	250 org	687.500.000	300 org	756.250.000	300 org	831.875.000	1.200 org	3.760.625.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.06	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WARSOSEK)	Jumlah rasio Warsosek yang diberdayakan	90 org	45 org	150.000.000	75 org	250.000.000	85 org	275.000.000	85 org	300.000.000	85 org	325.000.000	375 org	1.300.000.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.08	Pemberdayaan bagi keluarga fakir miskin	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	3.500 org	143 org	432.000.000	100 org	200.000.000	100 org	250.000.000	100 org	300.000.000	100 org	350.000.000	543 org	1.532.000.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.16	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)	Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan	20 org	120 org	120.000.000	150 org	500.000.000	175 org	575.000.000	180 org	585.000.000	180 org	632.225.000	805 org	2.412.225.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.17	Pendampingan pemberdayaan warga KAT	Frekuensi pemberdayaan warga KAT	384 org	44 org	64.142.420	44 org	220.000.000	85 org	425.000.000	85 org	425.000.000	85 org	425.000.000	484 org	1.559.142.420		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.18	Bantuan stimulan bedah rumah penduduk (Fakir Miskin)	Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan	294 Org	2 org	47.221.000	50 org	750.000.000	50 org	750.000.000	50 org	800.000.000	50 org	800.000.000	202 org	3.147.221.000		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.15.19	Bantuan stimulan pembangunan rumah adat KAT	Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan	0 org	2 Rumah Adat	187.300.120	2 Rumah Adat	235.000.000	2 Rumah Adat	250.000.000	2 Rumah Adat	300.000.000	2 Rumah Adat	325.000.000	10 Rumah Adat	1.297.300.120		Tersebar di 19 Kec.
		1.06.01.16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase penanganan korban sosial	100%	20%	928.302.622	20%	1.860.163.859	20%	2.048.663.859	20%	2.373.280.245	20%	2.608.108.269	100%	9.711.095.804		Tersebar di 19 Kec.
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Eksploitasi, Perdagangan	Jumlah anak yang menjadi bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan	12 org			20 org	100.000.000	20 org	110.000.000	20 org	121.000.000	20 org	133.100.000	92 org	464.100.000		Tersebar di 19 Kec.		

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

			perempuan dan anak	anak														
	1.06.01.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	463 klien	25 klien	103.923.050	25 klien	150.000.000	25 klien	165.000.000	25 klien	181.500.000	25 klien	199.650.000	588 klien	696.150.000		RPTC Larantuka
	1.06.01.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah KK yang diberikan bantuan	3.600 org	2.000 org	259.239.8	2.000 org	285.163.8	2.000 org	367.663.8	2.000 org	404.430.2	2.000 org	444.873.2	10.000 org	1.761.371.1		Sesuai kejadian
	1.06.01.16.13	Sosialisasi pencegahan penggunaan NAPZA	Jumlah Anak yang mendapatkan Sosialisasi NAPZA	600 org	200 org	56.305.300	200 org	75.000.000	200 org		200 org	90.750.000	200 org	99.825.000	1.000 peserta	321.880.300		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.16.19	Pemberian bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos	Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan PMKS dan PSKS	322 org	322 org	128.534.450	322 org	350.000.000	322 org	353.500.000	322 org	388.850.000	322 org	427.735.000	1.610 org	1.645.119.450		4 Kec. / 6 Panti
	1.06.01.16.20	Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi PKH	5.452 org	3.990 org	161.009.950	7.952 org	300.000.000	10.452 org	385.000.000	12.592 org	450.000.000	15.452 org	495.000.000	50.438 org	1.791.009.950		19 Kec.
	1.06.01.16.21	Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti	Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial	217 org lansia	120 org lansia	219.290.000	150 lansia	250.000.000	150 lansia	257.500.000	150 lansia	265.750.000	150 lansia	274.825.000	937 org	1.267.365.000		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.16.22	Rehabilitasi Eks Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah	Jumlah Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah yang direhabilitasi	150 org			30 org	100.000.000	30 org	110.000.000	30 org	121.000.000	30 org	133.100.000	270 org	464.100.000		Sesuai kejadian
	1.06.01.16.18	Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah	jumlah Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan	6 kasus			6 kasus	250.000.000	6 kasus	300.000.000	6 kasus	350.000.000	6 kasus	400.000.000	30 lokasi	1.300.000.000		Sesuai kejadian

RENSTRA (2017-2022) – Dinas Sosial Kab. Flores Timur

	nflik/perbatasan																
1.06.01.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang ditangani	1%	0		2%	175.000.000	2%	185.000.000	2%	196.000.000	2%	208.100.000	9%	764.100.000		
1.06.01.17.02	Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dilatih	33 anak terlantar			30 anak terlantar	100.000.000	30 anak terlantar	105.000.000	30 anak terlantar	110.500.000	30 anak terlantar	116.550.000	150 anak terlantar	432.050.000		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.17.04	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang memiliki bakat melalui kompetensi dan bantuan sosial				20 anak terlantar	75.000.000	20 anak terlantar	80.000.000	20 anak terlantar	85.500.000	20 anak terlantar	91.550.000	1000 anak terlantar	332.050.000		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.18	Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	13%	3%		7%	675.000.000	7%	2.697.500.000	7%	722.250.000	7%	749.475.000	44%	5.350.111.900		
1.06.01.18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah /rumah Perawatan Penyandang cacat dan trauma yang dibangun	1 unit					1 unit	2.000.000.000				1 unit	2.000.000.000		Tersebar di 19 Kec.	
1.06.01.18.03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	34 org			20 org	75.000.000	20 org	82.500.000	20 org	90.750.000	20 org	99.825.000	120 org	384.075.000		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	387 Penyandang Disabilitas	62 Penyandang Disabilitas	505.886.900	100 Penyanda ng Disabilita s	500.000.000	100 Penyanda ng Disabilita s	507.500.000	100 Penyanda ng Disabilita s	515.750.000	100 Penyanda ng Disabilita s	524.825.000	846 Penyand ang Disabilit as	2.553.961.900		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.18.06	Pengobatan dan Perlindungan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yg mendapat pengobatan dan perlindungan sosial	10 Penyandang Disabilitas			50 penyanda ng disabilitas	100.000.000	50 penyanda ng disabilita s	107.500.000	50 penyanda ng disabilita s	115.750.000	50 penyanda ng disabilita s	124.825.000	250 penyanda ng disabilita s	448.075.000		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.19	Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina	322 org			322 org	250.000.000	322 org	275.000.000	322 org	300.000.000	322 org	325.000.000	10 panti dan 150 org	1.150.000.000		
1.06.01.19.01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Jumlah sarana prasarana panti yang dibangun	-	-	-	-		1 unit	500.000.000	-	--	-	--	1 unit	500.000.000		Tersebar di 19 Kec.
1.06.01.19.02	Rehabilitasi	Jumlah	-	-	-	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	4 unit	400.000.000		Tersebar

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

		sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo	rehabilitasi panti yang dibangun															di 19 Kec.
	1.06.01.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan	322 org	-	-	322 org	250.000.000	322 org	275.000.000	322 org	300.000.000	322 org	325.000.000	1.610 org	1.150.000.000		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.20	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	18%	7%	103.923.050	12%	300.000.000	12%	330.000.000	12%	363.000.000	12%	399.300.000	73%	1.496.223.050		
	1.06.01.20.01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Eks Penyandang sosial	-	-	40 Eks Penyandang sosial	100.000.000	40 Eks Penyandang sosial	110.000.000	40 Eks Penyandang sosial	121.000.000	40 Eks Penyandang sosial	133.100.000	225 Eks Penyandang sosial	464.100.000		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.20.04	Pemberdayaan bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan	25 Eks Penyandang sosial	35 Eks Penyandang sosial	103.923.050	40 Eks Penyandang sosial	125.000.000	40 Eks Penyandang sosial	137.500.000	40 Eks Penyandang sosial	151.250.000	40 Eks Penyandang sosial	166.375.000	220 Eks Penyandang sosial	684.048.050		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.20.06	Pendidikan dan Ketrampilan Berusaha bagi kelompok Minoritas	Jumlah Kelompok Minoritas yang mengikuti Pendidikan dan Ketrampilan	-	-	-	20 kelompok minoritas	75.000.000	20 kelompok minoritas	82.500.000	20 kelompok minoritas	90.750.000	20 kelompok minoritas	99.825.000	80 kelompok minoritas	348.075.000		Tersebar di 19 Kec.
Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	-	9,92%	595.056.918	87,70%	2.590.000.000	90,48%	3.225.250.000	96,43%	2.147.500.000	96,43%	2.682.375.000	96,43%	11.240.181.918		
Meningkatkan Kesempatan kerja	1.06.01.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Dunia Usaha terhadap peran aktif dari masyarakat	-	-	-	100 lembaga	375.000.000	100 lembaga	412.500.000	100 lembaga	453.750.000	100 lembaga	499.125.000	400 lembaga	1.740.375.000		Tersebar di 19 Kec.
Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	1.06.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rasio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek	-	24 lembaga	467.556.918	44 lembaga	750.000.000	50 lembaga	825.000.000	60 lembaga	907.500.000	76 lembaga	998.250.000	252 lembaga	3.948.308.918		Tersebar di 19 Kec.
	1.06.01.21.05	Penanaman nilai-nilai	Jumlah masyarakat	-	-	-	62 lembaga	350.000.000	62 lembaga	385.000.000	62 lembaga	464.000.000	64 lembaga	510.000.000	250 lembaga	1.709.000.000		Tersebar di 19

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

		keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa														Kec.
	1.06.01.21.06	Kampanye restorasi sosial	Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa	-	-	-	14 lembaga	225.000.000	15 lembaga	240.000.000	20 lembaga	250.000.000	20 lembaga	275.000.000	69 lembaga	990.000.000	Tersebar di 19 Kec.
Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.06.01.21.07	Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah data PMKS	34.310 org	-	-	250 desa/kelurahan	275.000.000	-	-	250 desa/kelurahan	350.000.000	-	-	250 desa/kelurahan	625.000.000	19 Kec/ 250 Desa/Kelurahan
	1.06.01.21.08	Koordinasi dan Pemutakhiran Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Perkotaan, Pedesaan dan Pesisir, serta Data KIP, KIS, dan KKS	Jumlah data RTM	67.586 org	-	-	250 desa/kelurahan	350.000.000	-	-	250 desa/kelurahan	450.000.000	-	-	250 desa/kelurahan	800.000.000	19 Kec/ 250 Desa/Kelurahan
	1.06.01.21.11	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	41 orang	-	-	41 orang	123.000.000	41 orang	147.600.000	41 orang	172.200.000	41 orang	196.800.000	41 orang	639.600.000	Larantuka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan *Selamatkan orang Muda dari Masalah sosial Budaya* dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Sosial yaitu *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, maka sejumlah indikator bagi pencapaian sasaran umum dalam rangka pencapaian rangkaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, dapat diukur dari :**
 - a. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- 2. Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dapat diukur dari ;**
 - a. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
 - b. Jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui Kube
 - c. Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan
 - d. Jumlah rasio KMM yang diberdayakan
 - e. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi PKH
- 3. Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar, dapat diukur dari ;**
 - a. Jumlah pemberdayaan warga KAT
 - b. Jumlah Rumah adat yg dibangun
 - c. Jumlah Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan
 - d. Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan
- 4. Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS, dapat diukur dari ;**
 - a. Jumlah rasio Warsosek yang diberdayakan
 - b. Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan
 - d. Jumlah Kelompok Minoritas yang mengikuti Pendidikan dan Ketrampilan
 - e. Jumlah Anak yang mendapatkan Sosialisasi NAPZA

5. ***Indikator untuk pencapaian sasaran Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya , dapat diukur dari;***
 - a. Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana
 - b. Jumlah anak yang menjadi bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak
 - c. Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan
 - d. Jumlah Penyandang Disabilitas yg mendapat pengobatan dan perlindungan sosial
 - e. Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial.
 - f. Jumlah Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah yang direhabilitasi

6. ***Indikator untuk pencapaian sasaran Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana, dapat diukur dari ;***
 - a. Jumlah KK yang diberikan bantuan

7. ***Indikator untuk pencapaian sasaran Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat, dapat diukur dari ;***
 - a. Jumlah /rumah Perawatan Penyandang cacat dan trauma yang dibangun
 - b. Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.
 - c. Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang difasilitasi dana pemberdayaan.

8. ***Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, dapat diukur dari :***
 - a. Ratio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek
 - b. Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi
 - c. Jumlah data PMKS yang terlibat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
 - d. Jumlah Dunia Usaha terhadap peran aktif dari masyarakat
 - e. Jumlah Bantuan yang diberikan kepada lembaga sosial dalam penanganan PMKS dan PSKS

9. ***Indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial, dapat diukur dari :***
 - a. Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa

10. Indikator untuk pencapaian sasaran Membina dan mengembangkan peran Karang taruna guna terciptanya kemandirian pada generasi muda , dapat diukur dari ;

- a. Jumlah Karang Taruna yang diberikan bimbingan teknis dan ketrampilan dalam bidang manajemen organisasi, ketrampilan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), kepemimpinan dan kaderisasi serta ketrampilan teknis.
- b. Jumlah Karang Taruna yang diberikan fasilitas dan bantuan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan Karang Taruna.

11. Indikator untuk pencapaian sasaran Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial , dapat diukur dari ;

- a. Jumlah sarana prasarana panti yang dibangun/direhabilitasi
- b. Jumlah penghuni panti yang diberikan pelatihan dan ketrampilan
- c. Jumlah Panti yang di fasilitasi berupa dana operasional
- d. Jumlah pengurus panti yang diberikan pelatihan dan pendampingan

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47 org	-	9 org	12 org	16 org	16 org	53 org
2.	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	-	-	25 org	25 org	25 org	25 org	100 org
3.	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui Kube	350 Kube	10 Kube	10 Kube	10 Kube	10 Kube	10 Kube	50 Kube
4.	Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan	3.500 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	500 org
5.	Jumlah rasio KMM yang diberdayakan	150 org	150 org	200 org	250 org	300 org	300 org	1.200 org
6.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi PKH	5.452 org	3.990 org	7.952org	10.452 org	12.592 org	15.452 org	50.430 org
7.	Jumlah pemberdayaan warga KAT	384 org	44 org	44 org	85 org	85 org	85 org	484 org
8.	Jumlah Rumah adat yg dibangun	-	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat	2 rumah adat	10 rumah adat
9.	Jumlah Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan	6 kasus	-	6 kasus	6 kasus	6 kasus	6 kasus	30 kasus
10.	Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan	20 org	120 org	150 org	175 org	180 org	180 org	805 org
12.	Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Eks Penyandang sosial	-	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	225 Eks Penyandang sosial
13.	Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan	25 Eks Penyandang sosial	35 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	40 Eks Penyandang sosial	220 Eks Penyandang sosial
14.	Jumlah Kelompok Minoritas yang mengikuti Pendidikan dan Ketrampilan	-	-	20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas	20 kelompok minoritas	80 kelompok minoritas
15.	Jumlah Anak yang mendapatkan Sosialisasi NAPZA	600 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	1.000 org
16.	Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	463 klien	25 klien	25 klien	25 klien	25 klien	25 klien	588 klien

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

17.	Jumlah anak yang menjadi bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak	12 org	-	20 org	20 org	20 org	20 org	92 org
18.	Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan	33 anak terlantar		33 anak terlantar	33 anak terlantar	33 anak terlantar	33 anak terlantar	150 anak terlantar
19.	Jumlah Penyandang Disabilitas yg mendapat pengobatan dan perlindungan sosial	10 Penyandang Disabilitas		50 Penyandang Disabilitas	50 Penyandang Disabilitas	50 Penyandang Disabilitas	50 Penyandang Disabilitas	250 Penyandang Disabilitas
20.	Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial	217 org Lansia	120 org Lansia	150 org Lansia	150 org Lansia	150 org Lansia	150 org Lansia	937org Lansia
21.	Jumlah Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah yang direhabilitasi	150 org		30 org	30 org	30 org	30 org	270 org
22.	Jumlah KK yang diberikan bantuan	3.600 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org	10.000 org
23.	Jumlah /rumah Perawatan Penyandang cacat dan trauma yang dibangun	1 unit	-	-	1 unit	-	-	1 unit
24.	Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	34 org	-	20 org	20 org	20 org	20 org	120 org
25.	Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang difasilitasi dana pemberdayaan	387 Penyandang Disabilitas	62 Penyandang Disabilitas	100 Penyandang Disabilitas	100 Penyandang Disabilitas	100 Penyandang Disabilitas	100 Penyandang Disabilitas	846 Penyandang Disabilitas
26.	Ratio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek	-	24 lembaga	44 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	76 lembaga	400 lembaga
27.	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	41 org	41 org	41 org	41 org	41 org	41 org	41 org
28.	Jumlah data PMKS yang terlibat dalam pelayanan kesejahteraan sosial	34.310 org	-	250 Desa/Kelurahan	-	250 Desa/Kelurahan	-	250 Desa/Kel.
29.	Jumlah Dunia Usaha terhadap peran aktif dari masyarakat			100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	400 lembaga
30.	Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa	-	-	62 lembaga	62 lembaga	62 lembaga	64 lembaga	250 lembaga
31.	Jumlah Karang Taruna yang diberikan bimbingan teknis dan ketrampilan dalam bidang manajemen organisasi, ketrampilan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), kepemimpinan dan kaderisasi serta ketrampilan teknis	-	24 lembaga	44 lembaga	50 lembaga	60 lembaga	76 lembaga	252 lembaga

RENSTRA (2017-2022) –Dinas Sosial Kab. Flores Timur

32.	Jumlah Karang Taruna yang diberikan fasilitas dan bantuan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan Karang Taruna	-	-	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	400 lembaga
33.	Jumlah sarana prasarana panti yang dibangun	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit
34.	Jumlah rehabilitasi panti yang dibangun	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4 unit
35.	Jumlah penghuni panti yang diberikan pelatihan dan ketrampilan	322 org	-	322 org	322 org	322 org	322 org	1.610 org

BAB VIII P E N U T U P

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi Bupati Flores Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan, yakni : **“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”**. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Dinas) dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan berkat dari *Gelekat Lewo Tanah*, akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui dan melindungi kita semua.

Larantuka, 22 Februari 2018

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur, 



DRS. THEODORUS K. MARAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 199103 1 005